

PENGARUH *AUDIT FEE* TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Dinie Setyawati¹; Poppy Sofia Koeswayo²; Evita Puspitasari³

Universitas Padjadjaran, Kota Bandung^{1,2,3}

Email : dinie18001@mail.unpad.ac.id¹; poppy.sofia@unpad.ac.id²;
evita.puspitasari@unpad.ac.id³

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk mengenali pengaruh *audit fee* pada integritas laporan keuangan serta untuk mengenali moderasi kepemilikan institusional pada pengaruh *audit fee* dan integritas laporan keuangan. Pada riset ini integritas laporan keuangan diukur dengan akrual diskresioner. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam riset ini. Populasi pada riset ini adalah perusahaan sektor keuangan yang sudah tercatat dalam daftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 - 2019. Teknik *purposive sampling* dengan beberapa standar digunakan untuk menentukan sampel pada riset ini. Model analisis regresi data panel digunakan sebagai teknik analisis data pada riset ini. Hasil dari riset ini menunjukkan *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan sementara kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh dari *audit fee* terhadap integritas laporan keuangan.

Kata kunci : *Audit Fee*; Kepemilikan Institusional; Integritas Laporan Keuangan

ABSTRACT

This research aimed to determine the effect of audit fee on integrity of financial statement and to understand the moderation of institutional ownership in the relationship between audit fee and integrity of financial statement. In this research, integrity of financial statement was measured by discretionary accrual. The research method applied in this study was descriptive methods. Population in this study at financial companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The sample was taken by purposive sampling technique that is specific sample selection criteria. The data analytical method used in this study was regression of panel data. The result of this research indicates that audit fee has significant effect on integrity of financial statement while institutional ownership is not able to moderate the relationship between audit fee and integrity of financial statement.

Keywords : Audit Fee; Institutional Ownership; Integrity of Financial Statement

PENDAHULUAN

Laporan keuangan menjadi alat komunikasi sebagai penghubung antara pihak eksternal serta pihak internal yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (Utari and Sari, 2016). PSAK 1 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengemukakan makud dari laporan keuangan. Maksud dari laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyerahkan informasi yang berguna untuk para pengguna laporan keuangan ketika menjalani keputusan ekonomi. Informasi yang diberikan

termasuk arus kas, kinerja keuangan, dan posisi keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan wajib mengadakan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan benar serta dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi (Auliyah, Fitriyani and Herawaty, 2022). Pelaksanaan audit pada laporan keuangan bisa menjaga kepentingan publik serta melindungi kepercayaan dan keandalan laporan keuangan entitas (Setyawati and Apandi, 2019).

Dalam praktiknya banyak entitas yang menyusun laporan keuangan tidak mengamati integritas laporan keuangan. Diantaranya adalah kasus manipulasi laporan keuangan serta melibatkan akuntan publik. Berikut adalah bukti-bukti penyusunan laporan keuangan perusahaan tanpa memperhatikan integritas laporan keuangan seperti kasus yang terjadi pada Deloitte tentang hasil pemeriksaan OJK pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (SBE). AP dari KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (SBE) memberikan unqualified opinion untuk laporan keuangan tahunan PT SNP. Namun, sebenarnya SNP Finance gagal membayar bunga *medium term notes* (MTN) (Lestari, 2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, laporan keuangan yang dibuat PT SNP terindikasi berbeda dengan keadaan keuangan yang sesungguhnya sehingga menimbulkan kerugian bagi beberapa kalangan. OJK menganggap itu termasuk perbuatan melanggar dengan kategori berat terhadap POJK Nomor 13/POJK.03/2017. OJK memberikan hukuman pada akuntan publik serta kantor akuntan publik melalui siaran pers tanggal 1 Oktober 2018 untuk melarang audit pada bidang IKNB, pasar modal serta perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Pelanggaran lainnya yaitu laporan keuangan yang dimodifikasi terjadi pada PT Bank Bukopin Tbk. Sudah lebih dari lima tahun yang lalu perbuatan memodifikasi data kartu kredit dilakukan. Modifikasi tersebut mengakibatkan peningkatan yang tidak tepat pada posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin. Namun, kondisi ini tidak terdeteksi auditor independen Bukopin yaitu KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (EY). Manajemen Bukopin melakukan revisi laporan keuangan tahun 2015 hingga 2017. Bank Bukopin merevisi laporan keuangan dan terjadi penurunan laba bersih 2016 yang sebelumnya Rp 1,08 triliun jadi Rp 183,56 miliar. Pengurangan paling besar terjadi pada pendapatan dari kartu kredit yaitu pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan ini

sebelumnya Rp1,06 triliun jadi Rp 317,88 miliar (Banjarnahor, 2018).

Perkara yang mendapat perhatian baru-baru ini yaitu mengenai skandal Jiwasraya. Kementerian Keuangan sudah melaksanakan penelaahan pada Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sebelumnya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dikabarkan sudah mencatat laba semu dari tahun 2006. Sejak tahun 2006 sampai 2012 KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan adalah KAP yang memiliki tanggung jawab atas proses audit PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mulai tahun 2010 sampai 2013 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menunjuk KAP Hartanto, Sidik, dan Rekan untuk melaksanakan audit laporan keuangan. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diaudit oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) (Fauzia, 2020).

Fraud yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah lama terdeteksi. Tepatnya, pada 2018, tim audit internal mendapatkan beberapa penyelewengan kewenangan yang dilaksanakan oleh tim manajemen investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang melanggar hal pokok yang menjadi dasar untuk investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Berdasarkan perolehan pemeriksaan Kejaksaan Agung menyebutkan, Jiwasraya disangka mempraktikkan penyelewengan investasi yang menjadikan turut terlibat tiga belas perusahaan manajer investasi yang menyalahi *good corporate governance* dan merugikan negara sebesar Rp 12,157 triliun (Sidik, 2020). Selain itu, Kejaksaan Agung diminta menindaklanjuti hasil investigasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga melakukan *fraud*, dan total nilainya dari tahun 2008 hingga 2018 mencapai Rp100 triliun (Sukarno, 2020). Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M Ihsanuddin menjelaskan bahwa dalam industri asuransi penerapan *Good Corporate Governance* masih belum baik (Fuad, 2020).

Menurut (ACFE, 2020) berdasarkan data dari Survei *Fraud* Indonesia tahun 2019, akibat adanya *fraud* industri keuangan dan perbankan jadi pihak yang paling dirugikan yaitu sebesar 41,4%. Berdasarkan temuan ACFE (2018), sektor perbankan dan keuangan berada pada posisi teratas organisasi yang dirugikan akibat adanya *fraud*. Sektor keuangan masih menguasai nilai pasar saham yang dipedagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan industri keuangan yang sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia merupakan sumber pendanaan terbesar dan juga dapat digunakan sebagai

alternatif tempat investasi jangka panjang dan jangka pendek untuk masyarakat. Laporan keuangan harus memiliki informasi yang berintegritas yang dapat dipahami oleh penggunanya, hal ini harus memenuhi persyaratan kualitatif informasi akuntansi. (Auliyah, Fitriyani and Herawaty, 2022). Seharusnya, adanya auditor yang cermat dalam menilai laporan keuangan entitas, diharapkan dapat mencegah masalah yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan (Putri, 2021).

Audit fee masih menjadi hal yang diperhatikan oleh IAPI sebagaimana paparan Tarkosunaryo, Ketua IAPI, pada kegiatan *Certified Public Accountant of Indonesia Professional Recognition Program (CPA-PRP)* yang dipaparkan di web Solomon Consulting Group bahwa dengan mempertimbangkan rasio pendapatan *fee* per kapita saat ini, KAP diminta untuk meningkatkan audit fee untuk meningkatkan kualitas jasa asurans. Jasa akuntan publik cuma menyumbang kira-kira 1,2 dari pendapatan per kapita nasional. Pendapatan per kapita jasa akuntan publik ini masuk dalam bilangan yang tidak tinggi. Sebagai Ketua IAPI, Tarko mendorong seluruh Akuntan Publik di Indonesia untuk mempertimbangkan biaya jasa audit dan jasa lainnya dan jangan sampai menjualnya dengan nilai yang lebih rendah, beliau berkeinginan supaya rasio pendapatan per kapita akuntan publik bisa meningkat (Solomon Consulting Group, 2013).

Fenomena ini menunjukkan bahwa besaran biaya audit masih belum wajar. Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 mengenai Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan menunjukkan bahwa hal mengancam berupa keperluan diri sendiri dan ketidaktaatan pada kode etik profesi akuntan publik bisa terjadi ketika biaya audit laporan keuangan yang terlampau rendah. Akibatnya kantor akuntan publik harus mengambil tindakan preventif dengan mengenakan biaya audit laporan keuangan yang memadai untuk melakukan tahap kegiatan yang memadai untuk menyelesaikan audit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2016).

Sejauh ini, di Indonesia masih banyak diperbincangkan mengenai biaya audit yang dinilai tidak sesuai. (Fitriany, Veronica and Anggraita, 2016) menyatakan bahwa saat ini, hanya 12% perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan biaya audit pada laporan keuangan. Implikasinya adalah pemerintah perlu memaksa seluruh perusahaan yang terdaftar untuk mengungkapkan biaya audit pada laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan bisa menentukan ada tidaknya ikatan ekonomi antara klien dengan

auditor yang bisa menyebabkan rendahnya kualitas informasi laporan keuangan.

Besar kecilnya biaya audit ditentukan dari konsensus antara kantor akuntan publik beserta klien. Keadaan ini bisa menjadikan rusak independensi auditor eksternal sebagai profesional yang disebabkan dari adanya perang tarif biaya audit antara kantor akuntan publik (Prawira, Anisma and Anggraini, 2017).

Studi mengenai pengaruh biaya audit pada integritas laporan keuangan merupakan topik yang masih menarik untuk dilakukan riset kembali karena hasil riset yang tidak selaras dari para peneliti sebelumnya sebagaimana (Nurmala, Bustanti and Adiwibowo, 2021), (Serly and Helmayunita, 2018), dan (Puspita and Utama, 2016) menyatakan bahwa semakin tinggi biaya audit akan meningkatkan integritas laporan keuangan, namun penelitian dari (Ilahi and Muslim, 2022) menyatakan sebaliknya bahwa terdapat hubungan negatif antara biaya audit dan integritas laporan keuangan dan riset (Auliyah, Fitriyani and Herawaty, 2022) dan (Mulyana and Mulyani, 2019) menyatakan bahwa biaya audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Ketika melakukan operasi perusahaan seringkali terjadi perselisihan keperluan antara prinsipal serta agen (*agency problem*). Kepemilikan institusional menjadi suatu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengendalikan masalah keagenan (Jensen and Meckling, 1976). Pemantauan oleh investor institusional termasuk pada permintaan upaya audit yang lebih tinggi dari auditor untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Tee *et al.*, 2017).

Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, maka perlu melakukan kajian untuk melihat pengaruh *audit fee* pada integritas laporan keuangan yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam mempelajari efek moderasi kepemilikan institusional yang belum pernah dilaksanakan oleh orang yang meneliti sebelumnya.

Riset ini diharapkan dapat menjadi pembanding ataupun memperbaiki riset sebelumnya. Selain itu, riset ini juga bisa menjadi sumber acuan untuk orang yang meneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat menyerahkan kontribusi penelitian untuk mengembangkan teori akuntansi khususnya pada bidang *audit fee*, kepemilikan institusional, serta integritas laporan keuangan dan dapat menambah literatur yang ada. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberi implikasi terhadap entitas mengenai penentuan besaran

audit fee yang wajar dalam rangka meningkatkan integritas laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori agensi menjelaskan ikatan keagenan merupakan perjanjian antara prinsipal dengan agen (Jensen and Meckling, 1976). Dalam kontrak ini agen didelegasikan oleh prinsipal untuk bertindak atas nama prinsipal. Namun kepentingan antara prinsipal dan agen tidak selalu beriringan.

Umumnya setiap individu bertindak sesuai dengan kepentingan diri sendiri. Prinsipal sebagai pemegang saham mengharapkan keuntungan maksimal dari dana yang telah diinvestasikannya. Sedangkan agen sebagai pelaksana kegiatan operasional dalam perusahaan mengharapkan insentif yang besar atas pengelolaan tersebut. Prinsipal tidak dapat memantau semua aktivitas agen setiap hari. Dan agen terkadang tidak bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Manajemen sebagai pihak dari dalam entitas mengetahui informasi lebih banyak daripada prinsipal/pihak dari luar entitas (Sumantaningrum and Kiswara, 2017).

Ketidakseimbangan pemahaman informasi memicu suatu keadaan yang bisa disebut dengan asimetri informasi (Nicolin and Sabeni, 2013). Informasi yang mempunyai kualitas tinggi memberikan fasilitas transparansi yang makin besar. Transparansi yang makin besar dapat membantu menurunkan asimetri informasi. Ini dapat memberi kepuasan kepada investor serta pemangku kepentingan lainnya (Martínez-Ferrero, 2014). Data yang disampaikan oleh manajer dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan keadaan asli entitas karena manajer pada umumnya melaporkan data tertentu yang dapat memaksimalkan keperluannya (Amaliah, 2013). Keadaan ini menjadi peluang bagi manajer untuk memanipulasi laporan keuangan.

Untuk menanggulangi atau menurunkan asimetri informasi akan mengeluarkan biaya agensi. Salah satu biaya keagenan yaitu biaya penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan (*monitoring cost*) (Jensen and Meckling, 1976). Biaya monitoring merupakan biaya yang muncul yang dibebankan pada *principal* untuk mengamati perilaku agen, yakni menilai mutu, memperhatikan, serta menahan perilaku agen (Wedari, 2015). Konflik kepentingan bisa dibereskan melewati pihak ketiga sebagai perantara antara prinsipal dengan agen yang bersifat independen. Pihak ketiga akan memantau tingkah laku agen dan menjamin bahwa agen melakukan tindakan atas nama

kebutuhan prinsipal. Pihak ketiga yang bersifat independen disebut auditor eksternal, yaitu pihak yang akan mengaudit laporan keuangan organisasi dan membuktikan jika kepercayaan yang diberikan kepada agen digunakan atas nama agen atau tidak (Aqmarina and Yendrawati, 2019). Perolehan akhir dari audit yang dilakukan adalah opini dari akuntan publik. Akuntan publik dianggap menjadi pihak independen yang menyatakan opini kewajaran dari laporan keuangan. Karena itu bidang pekerjaan ini dianggap sebagai profesi yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan (Auliyah, Fitriyani and Herawaty, 2022).

Audit Fee

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mendefinisikan imbalan jasa adalah biaya yang didapat oleh Akuntan Publik dari pihak yang memperoleh layanan terkait jasa audit yang diberikan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2016). Menurut pendapat (Mohammed, Joshua and Ahmed, 2018), dalam memberikan layanan penting, auditor eksternal berhak atas biaya tertentu yang dibebankan kepada klien (*auditee*) sebagai remunerasi untuk upaya audit, biaya ini disebut "*audit fees*". Biaya audit bisa dijelaskan sebagai jumlah yang dibebankan pada klien dan diberikan pada auditor atas setiap hasil bekerja yang dilaksanakan untuk menyatakan opini atau posisi perusahaan klien yang sebenarnya (Abdul-Rahman, Benjamin and Olayinka, 2017). Sehingga biaya audit adalah kompensasi dari klien kepada auditor untuk jasa audit yang dilaksanakan.

Menurut (Meidawati and Assidiqi, 2019), besarnya biaya audit bergantung pada beberapa aspek, ialah:

1. ciri keuangan, semacam tingkatan pendapatan, keuntungan aset, modal, serta lainnya;
2. lingkungan, semacam persaingan, pasar staf profesional, serta lainnya;
3. ciri operasi, termasuk tipe industri, banyaknya posisi industri, banyaknya lini produk, serta lainnya;
4. aktivitas auditor eksternal, termasuk yang pernah dijalani, tingkatan koordinasi dengan auditor internal, serta lain – lain.

Meskipun *audit fee* diberikan oleh *auditee* namun auditor harus tetap memprioritaskan kepentingan publik (Ayu, Ida and Apit, 2019). Akuntan harus independen, tidak memihak kepada *auditee* dan tidak boleh terpengaruh oleh *fee* yang diperoleh ketika melaporkan atau mendeteksi kecurangan, karena pihak yang menggunakan hasil audit terutama adalah pihak selain *auditee* (Yandari and Sudaryati,

2017).

Corporate Governance

Corporate Governance menjadi seperangkat ketentuan yang memastikan jalinan antara investor, manajemen, kreditur, pemerintah, pekerja serta pemangku kepentingan dalam dan luar lainnya dalam hal hak dan kewajiban, atau semua kerangka kerja yang mengoordinasikan dan mengontrol perusahaan (Iswara, 2014). *Corporate Governance* ialah tata kelola entitas yang menarangkan jalinan antara bermacam pemangku kepentingan dalam entitas yang memastikan arah kinerja entitas (Damayanti and Rochmi, 2014). Menurut (Odudu, Terzungwe and Joshua, 2018) alasan struktur kepemilikan mengawasi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen entitas yaitu struktur kepemilikan dianggap sebagai parameter efektif pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi entitas yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan entitas dan kebijakan strategis.

Tata kelola usaha identik dengan teori keagenan, dimana penyelesaian konflik keagenan dicapai melalui pelaksanaan tata kelola entitas yang baik (Sukaniasih and Tenaya, 2016). Pelaksanaan tata kelola entitas yang baik merupakan suatu upaya untuk meminimalisir pengaruh krisis keuangan dan terjadinya *fraud* pada perusahaan yang dapat menurunkan nilai perusahaan (Wirawan and Diyanty, 2014). Keadilan, independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, serta transparansi identik dengan asas yang dianggap penting pada penerapan tata kelola entitas yang baik (Sunardi, 2019).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional termasuk dalam kelompok kepemilikan industri keuangan atas saham perusahaan misalnya industri perbankan, asuransi, dana pensiun, industri investasi, industri pembiayaan serta sekuritas yang dana investasinya menyumbang paling sedikit 5% dari seluruh saham perusahaan (Putri, Hardi and Silfi, 2017). Investor institusional memiliki analisis keuangan yang cukup profesional dibandingkan dengan investor lain, investor institusional juga lebih membutuhkan informasi yang berkualitas dan mempertimbangkannya daripada investor lain (Ashrafi, Mohammadnezhad and Ghanbari, 2017). Investor institusional lebih baik dalam mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi manajemen dalam penerbitan laporan keuangan sehingga tidak mudah diperdaya (Arista, Wahyudi and Yusnaini, 2018).

Investor institusional terlibat secara aktif dalam manajemen perusahaan dan

memberikan pengaruh terhadap kebijakan jangka panjang perusahaan (Tee *et al.*, 2017). Investor institusional semakin terdorong untuk menggunakan hak kepemilikannya untuk menekan manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham (Pratama, 2018). Entitas dengan kepemilikan institusional lebih besar mempunyai kualitas laba yang lebih baik sehingga dapat membatasi manajer dalam menggunakan kewenangan diskresioner mereka untuk melaporkan laba (Ajay and Madhumathi, 2015).

Integritas Laporan Keuangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran. Menurut (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2021) laporan keuangan merupakan kinerja keuangan serta posisi keuangan suatu entitas yang disajikan secara terstruktur. (Puspita and Utama, 2016) mendeskripsikan integritas laporan keuangan mengacu pada laporan keuangan yang dibuat menampilkan data secara jujur serta benar.

Laporan keuangan mesti menyajikan secara wajar arus kas, kinerja keuangan, dan posisi keuangan suatu entitas. Penyajian yang wajar memerlukan representasi yang pas akibat dari persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak, peristiwa serta keadaan lain cocok dengan definisi serta ukuran yang menjadi dasar penilaian pengakuan beban, pendapatan, liabilitas, dan aset yang ditentukan pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual). Pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dengan *disclosure* tambahan bila diperlukan, dianggap menciptakan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menyebutkan mengenai ciri kualitatif data keuangan yang bermanfaat. Supaya data keuangan menjadi berguna, data itu sudah semestinya relevan dan mewakili secara pas apa yang direpresentasikan. Kegunaan data keuangan bisa dimaksimalkan apabila data itu terpaham (*understandable*), tepat waktu (*timely*), terverifikasi (*verifiable*), dan terbanding (*comparable*) (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2019).

Pengukuran integritas laporan keuangan bisa diukur dengan memakai manajemen laba (Damayanti and Rochmi, 2014). Manajemen laba juga berkaitan erat dengan penyesuaian terhadap akrual diskresioner (Bing *et al.*, 2014). Pendekatan *discretionary accrual* berasal dari asumsi bahwa laporan keuangan yang lebih bermutu ditandai oleh tidak banyak campur tangan dari manajemen dalam mengatur keuntungan (Putri and Cahyonowati, 2014).

Pengaruh *Audit Fee* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Biaya audit membuat auditor dapat melaksanakan upaya audit lebih baik. Biaya audit yang wajar akan memberikan kebebasan yang cukup kepada akuntan publik untuk melakukan audit sesuai dengan prosedur yang memadai agar opini yang terbentuk benar dan sesuai dengan kondisi laporan keuangan (Harahap *et al.*, 2018). *Audit fee* yang tinggi mencerminkan risiko audit yang tinggi, oleh karena itu, untuk mengurangi risiko audit, alokasi waktu dan tenaga auditor yang dibutuhkan lebih banyak (Apandi and Sofia, 2018). Dalam penelitian (Nurmala, Bustanti and Adiwibowo, 2021) *audit fee* mempengaruhi positif signifikan pada integritas laporan keuangan. Hubungan yang positif menyimpulkan bahwa biaya operasional yang diperlukan buat melakukan proses audit bisa tingkatkan integritas laporan keuangan yang sudah dilaksanakan audit oleh auditor eksternal. Dengan biaya audit yang lebih banyak, auditor memiliki banyak sumber daya untuk mengumpulkan bukti, memverifikasi bukti dan mengevaluasi bukti untuk meyakinkan diri mereka sendiri tentang integritas laporan keuangan klien (Serly and Helmayunita, 2018). Auditor yang membebankan bayaran audit yang besar pada klien akan melaksanakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan audit yang lebih luas serta dalam pada entitas klien buat menemukan potensi penyimpangan pada laporan keuangan klien (Mulyani and Munthe, 2018).

Namun di sisi lain, besarnya biaya audit yang diberikan oleh klien kepada auditor dapat menyebabkan auditor tidak independen. Auditor akan mendapatkan tekanan dari klien. Auditor juga berusaha mempertahankan klien agar tidak berpindah ke auditor lain (Ilahi and Muslim, 2022). Ketergantungan ekonomi auditor pada klien sehingga untuk perikatan audit tahun depan tidak akan ditandatangani oleh auditor lain, hal tersebut menyebabkan auditor bersedia memberikan opini lebih dari yang diharapkan *auditee* (Apandi and Sofia, 2018). (Tobi, Osasrere and Emmanuel, 2016) rendahnya independensi auditor meningkatkan kemungkinan bahwa auditor tidak bersikap objektif. Ancaman utama terhadap independensi auditor adalah *fee* yang diterima oleh auditor. Menurut Okolie dalam (Tobi, Osasrere and Emmanuel, 2016) ketika independensi terganggu memungkinkan manajemen laba lebih besar serta kualitas laba lebih rendah.

Sesuai dengan dasar teori serta beberapa riset terdahulu, maka hipotesis riset ini yaitu :

H₁: *Audit fee* mempengaruhi integritas laporan keuangan.

Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi dalam Pengaruh *Audit Fee* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan saham institusional dalam jumlah yang banyak akan mempengaruhi kegiatan monitoring pemegang saham atas aksi yang diambil oleh entitas termasuk dalam rangkaian tindakan pelaporan keuangan (Wedari, 2015). Investor institusional dianggap lebih berpengetahuan dan waspada daripada investor individu (Tee *et al.*, 2017). Perusahaan dengan kepemilikan institusional lebih besar mempunyai kendali atas perusahaan (Putri, Hardi and Silfi, 2017).

Kepemilikan saham yang banyak (lebih dari 5%) memberi tanda kecakapannya buat memantau manajemen (Ali, 2019). Pemantauan manajemen membutuhkan kualitas pengawasan yang tinggi dari Kantor Akuntan Publik (Pratama, 2018). Pemantauan oleh investor institusional termasuk pada permintaan upaya audit yang lebih tinggi dari auditor untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Tee *et al.*, 2017). Investor institusional dapat mendorong auditor untuk berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan audit sesuai dengan prosedur yang memadai buat mengecek laporan keuangan supaya mendapat hasil laporan keuangan berintegritas.

Sesuai pada dasar teori serta beberapa riset terdahulu, maka hipotesis riset ini yakni:

H₂: Kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap integritas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Riset ini memakai kausal verifikatif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui variabel independen serta variabel dependen yang mempunyai hal yang ikut memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara variabel independen serta variabel dependen. Hal yang ikut mempengaruhi itu ialah kepemilikan institusional yang memoderasi pengaruh antara *audit fee* pada integritas laporan keuangan. Industri yang bergerak pada jasa keuangan yang sudah tercatat dalam daftar Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2019 dijadikan populasi pada riset ini.

Jumlah industri keuangan yang sudah tercatat dalam daftar Bursa Efek Tahun 2017 hingga 2019 adalah 96 entitas. Teknik *purposive sampling* dengan beberapa standar digunakan untuk menentukan sampel pada riset ini. Maka sampel pada riset ini sebanyak 45 entitas. Tabel 1 menunjukkan operasionalisasi variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Model persamaan yang dipakai dalam riset ini yakni:

Analisis Regresi Data Panel

Pengujian hipotesis pertama

$$DA = \beta_0 + \beta_1 FEE_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 ASSET_{it} + \beta_4 LIABILITIES_{it} + \beta_5 LOSS_{it} + e \quad (1)$$

Pengujian hipotesis kedua

$$DA = \beta_0 + \beta_1 FEE_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 FEE_{it} * KI_{it} + \beta_4 ASSET_{it} + \beta_5 LIABILITIES_{it} + \beta_6 LOSS_{it} + e \quad (2)$$

Keterangan :

- DA* : AkruaI diskresioner diukur dengan memakai model *modified Jones*
- FEE* : Logaritma natural *audit fee* pada entitas i di tahun ke t
- KI* : Persentase saham investor institusional dibagi dengan jumlah keseluruhan saham
- ASSET* : Logaritma natural total aset pada entitas i di tahun ke t
- LIABILITIES* : Logaritma natural total liabilitas pada entitas i di tahun ke t
- LOSS* : 1 apabila entitas mengalami kerugian, 0 lainnya

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Uji Regresi Data Panel

Dalam model penelitian pengujian regresi data panel pertama yang hanya menguji pengaruh *audit fee* pada integritas laporan keuangan, nilai R-squared (R^2) sebesar 0,624504 yang mengandung arti integritas laporan keuangan bisa diterangkan oleh variabel bebas dan variabel kontrol sebesar 62,45% dan sisanya 37,55% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dipaparkan pada riset ini. Pada model riset pengujian regresi data panel kedua, yang menguji pengaruh *audit fee* pada integritas laporan keuangan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi memiliki R-squared (R^2) sebesar 0,628985. Nilai tersebut mengindikasikan kalau variabel kontrol, variabel moderasi dan variabel independen mampu menjelaskan integritas laporan keuangan sebesar 62,90% dan sisanya 37,10% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dipaparkan pada riset ini. (Tabel 2)

Setelah dilaksanakan penelaahan maka diperoleh hasil uji analisis regresi data

panel menunjukkan bahwa model pertama dan kedua memiliki nilai t_{hitung} variabel *audit fee* berada pada daerah penolakan H_0 ($3,308062 > 1,979$) dan ($2,194141 > 1,979$) serta signifikansi variabel *audit fee* sebesar $0,0014^*$ dan $0,0310^{**}$. Artinya *audit fee* mempengaruhi secara signifikan pada integritas laporan keuangan. Bersumber pada data yang ada hipotesis ke satu terbukti secara empiris bahwa *audit fee* mempengaruhi integritas laporan keuangan yang diprosikan dengan akrual diskresioner. Hasil riset ini bertolak belakang dengan riset yang dilaksanakan oleh (Nurmala et al, 2021) tapi riset ini menunjang riset yang dilaksanakan oleh (Ilahi dan Muslim, 2022).

Berdasarkan uji analisis regresi data panel, variabel kepemilikan istitusional sebagai moderasi menghasilkan nilai t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 ($-1,979 < -1,007189 > 1,979$) dan nilai signifikansi sebesar $0,3167$ artinya kepemilikan istitusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hipotesis tidak bisa terbukti bahwa kepemilikan istitusional memoderasi pengaruh *audit fee* pada integritas laporan keuangan. Pengujian statistika deskriptif dengan menggunakan *software E-views 10* dapat dilihat pada tabel 3.

Dalam penelitian ini, integritas laporan keuangan diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif nilai *discretionary accrual* minimum sebesar $-0,477065$ sedangkan untuk nilai maksimum sebesar $0,235253$. Rata-rata nilai *discretionary accrual* sebesar $-0,035907$. Angka positif menyatakan bahwa entitas mempraktikkan maksimalisasi keuntungan sedangkan angka negatif menyatakan entitas meminimalisasi keuntungan. Secara umum entitas sektor keuangan meminimalisasi keuntungan. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata nilai *discretionary accrual* yang negatif.

Audit fee diukur dengan logaritma natural dari total biaya audit. Dalam Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif nilai maksimum *audit fee* sebesar $23,43$. Sedangkan nilai minimum sebesar $18,35$. Untuk rata-rata *audit fee* sebesar $20,91$. *Audit fee* secara umum meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif dapat dijelaskan, pada variabel kepemilikan istitusional nilai minimum sebesar 0% , nilai maksimum sebesar $99,11\%$, sedangkan untuk rata-rata sebesar $0,5854$ atau $58,54\%$. Pada variabel *asset*, nilai maksimum sebesar $34,89$, nilai minimum sebesar $27,69$, dengan nilai rata-rata sebesar $30,78$. Variabel *liabilities* memiliki nilai maksimum sebesar $34,71$, nilai

minimum sebesar 23,84, dengan nilai rata-rata sebesar 30,37. Sedangkan variabel *loss* nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar 0, dengan nilai rata-rata sebesar 0,096. Secara umum perusahaan sektor keuangan tidak mengalami kerugian.

Pembahasan

Pengaruh *Audit Fee* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Audit fee mempengaruhi secara signifikan pada integritas laporan keuangan. *Audit fee* berpengaruh positif pada akrual diskresioner. Besarnya *audit fee* akan membuat integritas laporan keuangan menjadi rendah. Besarnya biaya audit yang dibayar oleh klien kepada auditor dapat menyebabkan auditor tidak independen. Auditor akan mendapatkan tekanan dari klien. Auditor juga berusaha mempertahankan klien agar tidak berpindah ke auditor lain (Ilahi and Muslim, 2022). Bila KAP mendapat *audit fee* yang besar, KAP akan mengalami tekanan ekonomis buat menyerahkan opini bersih (dalam hal ini wajar tanpa pengecualian) (Puspita and Utama, 2016). Riset ini didukung riset yang dilaksanakan oleh (Ilahi and Muslim, 2022) yang menyebutkan besarnya *audit fee* akan membuat integritas laporan keuangan semakin rendah.

Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi dalam Pengaruh *Audit Fee* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional sebagai moderasi tidak mempengaruhi secara signifikan. Ini terjadi penyebabnya karena kehadiran dari investor institusi hanya berperan dalam mengawasi kinerja keuangan (Wulandari and Maulana, 2022). Tetapi tidak dapat mendorong auditor untuk berusaha dengan benar-benar melakukan audit sesuai dengan tahap kegiatan untuk menyelesaikan audit yang memadai buat memeriksa laporan keuangan. Kepemilikan institusional tidak cukup untuk memastikan pelaporan keuangan yang berintegritas (Priharta, 2017). Sehingga ini tidak memiliki dampak pada peningkatan integritas laporan keuangan. Investor institusional mempercayakan pada komite audit. Tugas komite audit adalah untuk mengevaluasi kinerja auditor eksternal atas jasa audit laporan keuangan. Tujuan utama investor institusional yaitu memaksimalkan keuntungan atas dana yang diinvestasikannya (Arista, Wahyudi and Yusnaini, 2018).

KESIMPULAN

Audit fee mempengaruhi secara signifikan pada integritas laporan keuangan. *Audit fee* yang besar akan membuat integritas laporan keuangan menjadi rendah.

Besarnya biaya audit yang diberikan oleh klien kepada auditor dapat menyebabkan auditor tidak independen. Diharapkan hasil riset ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan saat menentukan besaran *audit fee* yang wajar untuk mendorong peningkatan integritas laporan keuangan. Kepemilikan istitusional sebagai variabel moderasi tidak signifikan memoderasi pengaruh dari *audit fee* pada integritas laporan keuangan. Hal itu disebabkan karena investor institusional tidak bisa mendorong auditor untuk berusaha dengan benar-benar melakukan audit sesuai dengan tahap kegiatan untuk menyelesaikan audit yang memadai buat memeriksa laporan keuangan. Investor institusional lebih fokus pada keuntungan yang didapat atas dana yang diinvestasikannya.

Keterbatasan penelitian ini hanya menganalisis sektor keuangan saja. Hal ini memiliki arti bahwa hasil riset ini tidak bisa disimpulkan secara umum pada sektor lainnya. Oleh sebab itu, diharapkan buat periset berikutnya dapat melaksanakan riset pada sektor lain. Kurun waktu yang dipakai pada riset ini lumayan pendek. Untuk periset selanjutnya hendaklah mengambil kurun waktu lebih panjang pada riset untuk bisa mempelajari lebih lanjut *audit fee* yang terjadi antar kurun waktu yang lebih panjang berhubungan dengan integritas laporan keuangan. Pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai integritas laporan keuangan, penambahan variabel independen yang mungkin berpengaruh dapat membantu untuk mengetahui aspek-aspek lain yang bisa pengaruhi integritas laporan keuangan. Menambahkan variabel moderasi lain yang bisa memoderasi pengaruh dari *audit fee* pada integritas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, D. O. A., Benjamin, A. O. and Olayinka, O. H. (2017) 'Effect of Audit Fees on Audit Quality: Evidence from Cement Manufacturing Companies in Nigeria', *European Journal of Accounting*, 5(1), pp. 6–17.
- ACFE (2020) *Survei Fraud Indonesia 2019*, ACFE Indonesia Chapter. Jakarta.
- Ajay, R. and Madhumathi, R. (2015) 'Institutional Ownership and Earnings Management in India', *Indian Journal of Corporate Governance*, 8(2), pp. 119–136. doi: 10.1177/0974686215602368.
- Ali, M. (2019) 'Pengaruh Kepemilikan Istitusional, Kepemilikan Saham Publik, Umur Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas dengan Jumlah Bencana Alam sebagai Moderasi', *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(1), pp. 71–94. doi: 10.25105/jmat.v6i1.5068.
- Amaliah, T. H. (2013) 'Suatu Tinjauan Asimetri Informasi dan Implikasinya terhadap Manajemen Laba', in.
- Apandi, R. N. N. and Sofia, A. (2018) 'Audit Fee and Multiple Large Shareholder on Audit Quality', in *1st International Conference on Islamic Economics, Business,*

- and *Philanthropy*, pp. 375–379.
- Aqmarina, V. and Yendrawati, R. (2019) ‘The factors that influence audit quality by earnings surprise benchmark’, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 23(1), pp. 97–108. doi: 10.20885/jaai.vol23.iss1.art3.
- Arista, S., Wahyudi, T. and Yusnaini (2018) ‘Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Audit Tenure terhadap Integritas Laporan Keuangan’, *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), pp. 81–98.
- Ashrafi, M., Mohammadnezhad, S. and Ghanbari, R. (2017) ‘The Relationship between Institutional Ownership and Financial Leverage with Audit Quality in Companies Listed on Tehran Stock Exchange’, *Specialty Journal of Accounting and Economics*, 2(3), pp. 96–108.
- Auliyah, A. H. F., Fitriyani, D. and Herawaty, N. (2022) ‘Analisis Pengaruh Ukuran KAP, Audit Tenure, Audit Fee dan Independensi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), pp. 272–278. doi: 10.33087/jiubj.v22i1.2012.
- Ayu, P. D., Ida, R. and Apit, S. W. (2019) ‘The Influence of Company Size and Audit Fee on Audit Quality’, *1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance*, 65(Icebef 2018), pp. 371–375.
- Banjarnahor, D. (2018) ‘Drama Bank Bukopin: Kartu Kredit Modifikasi dan Rights Issue’, *CNBC Indonesia*, 27 April. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180427144303-17-12810/drama-bank-bukopin-kartu-kredit-modifikasi-dan-rights-issue>.
- Bing, J. (Jimmy) *et al.* (2014) ‘Audit Quality Summer Research Report’, *Australian National Centre for Audit and Assurance Research*, pp. 1–37.
- Damayanti, F. and Rochmi (2014) ‘Pengaruh Reputasi Auditor dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010)’, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(3), pp. 1–15.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2019) *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2021) *PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Fauzia, M. (2020) ‘Kemenkeu Lakukan Pemeriksaan ke KAP Jiwasraya’, *Kompas.com*, 15 January. Available at: <https://money.kompas.com/read/2020/01/15/143550426/kemenkeu-lakukan-pemeriksaan-ke-kap-jiwasraya>.
- Fitriany, Veronica, S. and Anggraita, V. (2016) ‘Impact of Abnormal Audit Fee to Audit Quality : Indonesian Case Study’, *American Journal of Economics*, 6(1), pp. 72–78. doi: 10.5923/j.economics.20160601.09.
- Fuad, H. (2020) *OJK Siap Benahi Tata Kelola Asuransi Demi Penetrasi*, *SINDONEWS.com*. Available at: <https://ekbis.sindonews.com/read/160842/178/ojk-siap-benahi-tata-kelola-asuransi-demi-penetrasi-1599757746> (Accessed: 19 May 2021).
- Hanafi, M. M. and Halim, A. (2016) *Analisis Laporan Keuangan*. 5th edn. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, D. Y. *et al.* (2018) ‘Audit Fee: Evidence from Indonesia after Adopting International Standards on Auditing (ISAs)’, *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), pp. 170–182.

- Hardiningsih, P. (2010) 'Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan', *Kajian Akuntansi*, 2(1), pp. 61–76.
- Ilahi, N. O. K. and Muslim, R. Y. (2022) 'Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan'.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) *Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Iswara, P. W. (2014) 'Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan', *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 2(2), pp. 121–131.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976) 'Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure', *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp. 305–360.
- Lestari, R. (2018) *OJK Jatuhkan Sanksi kepada Akuntan Publik dan KAP Auditor SNP Finance*, *Bisnis.com*. Available at: <https://finansial.bisnis.com/read/20181001/89/844236/ojk-jatuhkan-sanksi-kepada-akuntan-publik-dan-kap-auditor-snp-finance-> (Accessed: 27 October 2020).
- Martínez-Ferrero, J. (2014) 'Consequences of Financial Reporting Quality on Corporate Performance . Evidence at The International Level', *Estudios de Economía*, 41(1), pp. 49–88.
- Meidawati, N. and Assidiqi, A. (2019) 'The influences of audit fees, competence, independence, auditor ethics, and time budget pressure on audit quality', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(2), pp. 117–128. doi: 10.20885/jaai.vol23.iss2.art6.
- Mohammed, A. M., Joshua, O. and Ahmed, M. N. (2018) 'Audit Fees and Audit Quality: A Study of Listed Companies in the Downstream Sector of Nigerian Petroleum Industry', *Humanities and Social Sciences Letters*, 6(2), pp. 59–73. doi: 10.18488/journal.73.2018.62.59.73.
- Mulyana, A. and Mulyani (2019) 'Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor, Independensi, Fee Audit, Audit Tenure, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Laporan Keuangan (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)'. Available at: <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/984/>.
- Mulyani, S. D. and Munthe, J. O. (2018) 'Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, Audit Fee dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada KAP di DKI Jakarta', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5, pp. 151–170.
- Nicolin, O. and Sabeni, A. (2013) 'Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan', *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), pp. 1–12.
- Nurmala, P., Bustanti, D. and Adiwibowo, A. S. (2021) 'Factors Affecting the Integrity of Financial Statements: Empirical Evidence from Indonesian Listed Mining Firms', *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(1), pp. 1–12.
- Odudu, A. S., Terzungwe, N. and Joshua, O. (2018) 'Institutional and Block-holder Ownership and Audit Quality of Listed Manufacturing Firms in Nigeria', *Journal of Finance and Accounting*, 6(1), pp. 15–26. doi: 10.12691/jfa-6-1-3.
- Otoritas Jasa Keuangan (2018) *Siaran Pers OJK Kenakan Sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Auditor PT Sunprima Nusantara Pembiayaan*. Jakarta. Available at: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Kenakan-Sanksi-terhadap-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-Auditor-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx>.

- Pratama, A. (2018) 'How Do Indonesian Companies Select Their External Auditors? Exploratory Analysis of Company Characteristics , Corporate Governance , and Organisational Complexity', *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(4), pp. 63–76.
- Prawira, F. I., Anisma, Y. and Angraini, L. (2017) 'Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kesulitan Keuangan terhadap Fee Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014', *JOM Fekon*, 4(1), pp. 133–147.
- Priharta, A. (2017) 'Pengaruh Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan', *Journal of Applied Business and Economics*, 3(4), pp. 234–250.
- Puspita, M. A. P. W. and Utama, I. M. K. (2016) 'Fee Audit sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), pp. 1829–1856.
- Putri, S. A., Hardi and Silfi, A. (2017) 'Pengaruh Rotasi KAP Mandatory dan Voluntary terhadap Kualitas Audit dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Non Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014', *JOM Fekon*, 4(1), pp. 926–939.
- Putri, T. M. and Cahyonowati, N. (2014) 'Pengaruh Auditor Tenure, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2012)', *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), pp. 1–11. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6177%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/6177/5963>.
- Putri, Z. P. W. (2021) *Pengaruh Audit Fee, Audit Report Lag, Audit Tenure, dan Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Listing di BEI 2016-2020)*. Universitas Islam Indonesia. Available at: <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Serly, V. and Helmayunita, N. (2018) 'The Correlation of Audit Fee, Audit Quality and Integrity of Financial Statement', *Advances in Economics, Business and Management Research*, 64, pp. 67–72.
- Setyawati, D. and Apandi, R. N. N. (2019) 'Positive Abnormal Audit Fee dan Koneksi Politik terhadap Kualitas Audit', *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), pp. 271–278.
- Solomon Consulting Group (2013) *Akuntan Publik Diminta Untuk Meningkatkan Fee Audit*. Available at: <https://www.proscg.com/main/news/259/Akuntan-Publik-Diminta-Untuk-Meningkatkan-Fee-Audit>.
- Sukaniasih, N. K. and Tenaya, A. I. (2016) 'Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, dan Manajemen Laba terhadap Fee Audit', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), pp. 2161–2187.
- Sumantaningrum, Y. L. and Kiswara, E. (2017) 'Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kualitas Audit Dengan Variabel Moderasi Imbalan Audit', *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), pp. 1–13. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Sunardi, N. (2019) 'Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018', *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, 2(3), pp. 48–61.

- Tee, C. M. *et al.* (2017) 'Institutional Monitoring, Political Connections and Audit Fees: Evidence from Malaysian Firms', *International Journal of Auditing*, pp. 1–13. doi: 10.1111/ijau.12086.
- Tobi, B. A., Osasrere, A. O. and Emmanuel, U. (2016) 'Auditor's Independence and Audit Quality: A Study of Selected Deposit Money Banks in Nigeria', *International Journal of Finance and Accounting*, 5(1), pp. 13–21. doi: 10.5923/j.ijfa.20160501.02.
- Tuanakotta, T. M. (2011) *Berpikir Kritis dalam Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utari, N. P. L. A. and Sari, M. M. R. (2016) 'Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), pp. 1886–1914.
- Wedari, L. K. (2015) 'Aktivitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Biaya Audit', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), pp. 28–40. doi: 10.9744/jak.17.1.28-40.
- Wirawan, B. and Diyanty, V. (2014) 'Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik dan Family Aligned Board terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan', *JAAI*, 18(2), pp. 139–155.
- Wulandari, R. and Maulana, A. (2022) 'Institutional Ownership as Moderation Variable of Fraud Triangle on Fraudulent Financial Statement', *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 14(2), pp. 165–180.
- Yandari, A. D. and Sudaryati, E. (2017) 'How Decision Making to The Audit Fee, Audit Committee on A Audit Quality', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 15(2), pp. 45–51.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Independen: <i>Audit fee</i> (X)	<i>Audit fee</i> adalah hak auditor eksternal atas biaya tertentu yang dibebankan kepada klien (<i>auditee</i>) sebagai remunerasi untuk upaya audit (Mohammed, Joshua and Ahmed, 2018).	Logaritma natural dari total biaya audit yang dibayarkan oleh klien atas jasa audit digunakan untuk mengukur variabel ini. Menggunakan rumus di bawah ini: $\ln FEE = \log FEE$	Rasio
Variabel Dependen: Integritas laporan keuangan (Y)	Laporan keuangan yang mengungkapkan keadaan sebenarnya dari suatu perusahaan tanpa menyembunyikan apapun dikenal sebagai integritas laporan keuangan (Hardiningsih, 2010).	Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah akual diskresioner: $DA_{it} = (TA_{it}/A_{it}-1) - NDA_{it}$	Rasio
Variabel Moderasi: Kepemilikan institusional (Z)	Kepemilikan institusional termasuk dalam kelompok kepemilikan industri keuangan atas saham perusahaan misalnya industri perbankan, asuransi, dana pensiun, industri investasi, industri pembiayaan serta	Rumus untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah Saham Investor Institusional}}{\text{Jumlah Keseluruhan Saham}} \%$	Rasio

	sekuritas yang dana investasinya menyumbang paling sedikit 5% dari seluruh saham perusahaan (Putri, Hardi and Silfi, 2017).		
Variabel Kontrol: <i>Asset</i>	Aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dapat memperoleh keuntungan ekonomi bagi entitas di masa depan (Hanafi and Halim, 2016).	Logaritma natural total aset digunakan untuk mengukur variabel ini. Menggunakan rumus di bawah ini: $\ln ASSET = e^{\log ASSET}$	Rasio
Variabel Kontrol: <i>Liabilities</i>	Utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu entitas untuk memberikan jasa, barang, ataupun kas, dalam jumlah yang relatif pasti, pada masa yang akan datang dengan kurun waktu yang relatif pasti, sebagai ganti atas jasa ataupun keuntungan yang telah diperoleh entitas di masa lalu (Hanafi and Halim, 2016).	Logaritma natural total liabilitas digunakan untuk mengukur variabel ini. Menggunakan rumus di bawah ini: $\ln LIABILITIES = e^{\log LIABILITIES}$	Rasio
Variabel Kontrol: <i>Loss</i>	<i>Rate of return</i> dan kerugian pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan profitabilitas (Tuanakotta, 2011).	Variabel <i>dummy</i> digunakan untuk mengukur variabel ini. Nilai <i>dummy</i> 1 untuk entitas yang mengalami kerugian memiliki, sedangkan nilai <i>dummy</i> 0 untuk entitas yang tidak mengalami kerugian.	Nominal

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	I			II		
	Integritas Laporan Keuangan, <i>Audit Fee</i> , Kepemilikan Institusional, Kontrol			Integritas Laporan Keuangan, <i>Audit Fee</i> , Kepemilikan Institusional, Moderasi, Kontrol		
	Koefisien	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>	Koefisien	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
Variabel Independen :						
<i>AUDIT FEE</i>	0,085484	3,308062	0,0014*	0,148475	2,194141	0,0310**
Variabel Moderasi :						
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-0,003060	-1,949827	0,0545***	0,017055	0,851350	0,3970
<i>AUDIT FEE</i> * KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-	-	-	-0,000921	-1,007189	0,3167
Variabel Kontrol :						
<i>ASSET</i>	-0,167028	-4,208659	0,0001*	-0,172289	-4,304468	0,0000*
<i>LIABILITIES</i>	-0,014600	-1,207060	0,2308	-0,015178	-1,253519	0,2135
<i>LOSS</i>	0,049419	1,289156	0,2008	0,059440	1,500959	0,1371
R-Squared	0,624504			0,628985		
Keterangan :						
* taraf signifikansi 1%						
** taraf signifikansi 5%						
*** taraf signifikansi 10%						

Sumber : hasil *output Eviews 10*

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	DA	FEE	KI	ASSET	LIABILITIES	LOSS
Mean	-0.035907	20.90841	58.54366	30.77788	30.37042	0.096296
Maximum	0.235253	23.43378	99.10669	34.88715	34.70696	1.000000
Minimum	-0.477065	18.35347	0.000000	27.69061	23.84061	0.000000
Std. Dev.	0.088758	1.160095	33.22002	1.991405	2.185479	0.296096
Observations	135	135	135	135	135	135

Sumber : hasil *output Eviews 10*